

KOLABORASI MASYARAKAT PERBATASAN ACEH DAN SUMATERA UTARA DALAM MEMPERKUAT KOHESI SOSIAL

Irwan Putra¹, Maimun², Dinatul Adawiyah³, Muhammad Yunus⁴

^{1,2,3,4} Program Studi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia

e-mail: ¹irwanputra@usk.ac.id

Abstrak

Wilayah perbatasan provinsi merupakan wilayah yang memiliki tingkat heterogenitas yang tinggi karena perbedaan latar belakang etnis, agama, dan bahasa. Oleh karena itu, kawasan perbatasan seringkali menjadi kawasan yang berpotensi konflik karena tidak adanya integrasi antar masyarakat yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji realitas kolaborasi masyarakat di wilayah perbatasan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara dalam memperkuat kohesi sosial. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif, pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realitas kolaborasi masyarakat di perbatasan belum terdapat kolaborasi terstruktur dari pemerintah desa. Namun terdapat kerjasama dan interaksi sosial antar masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak perlu adanya kolaborasi terstruktur dari pemerintah untuk menghubungkan kedua desa tersebut. Masyarakat di desa perbatasan telah menjalin hubungan sosial dan kerjasama dalam aktivitas sehari-hari baik antar individu maupun kelompok. Upaya masyarakat dalam memperkuat kohesi sosial adalah dengan saling menghormati, menghargai, menjaga keharmonisan dan komunikasi agar tidak terjadi perbedaan paham. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah membuat program kerjasama terstruktur antar desa perbatasan untuk mempererat hubungan sosial. Penelitian ini juga menyarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut dengan melibatkan sampel yang lebih luas dan beragam serta menggunakan metode yang lebih efektif untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat.

Kata kunci: Kohesi sosial, kolaborasi, perbatasan wilayah

Abstract

The provincial border region is an area that has a high level of heterogeneity. cohesion due to differences in ethnic, religious and linguistic backgrounds. Thus, border areas often become areas with potential for conflict due to the lack of integration between existing communities. This study aims to examine the reality of community collaboration in the border areas of Aceh Province in strengthening social cohesion. Using a descriptive qualitative research approach, data was collected through observation and in-depth interviews. The results showed that the reality of community collaboration at the border does not have structured collaboration from the village government. However, there is cooperation and social interaction between the communities in their daily lives. This research concludes that there does not have to be structured collaboration from the government to connect these two villages. Communities in border villages have established social relations and cooperation in daily activities both between individuals and groups. Community efforts in strengthening social cohesion are by respecting each other, appreciating, maintaining harmony and communication so that there are no differences in understanding. This research suggests that the government should create a structured cooperation program between border villages to strengthen social relations. This study also suggests that further research be conducted by involving a wider and more diverse sample and using more effective methods to get more accurate results.

Keyword: Social Cohesion, Collaboration, Borders Area

PENDAHULUAN

Kohesi sosial merupakan keadaan di mana setiap elemen sosial dalam masyarakat berfungsi untuk membentuk norma-norma bagi kehidupan bersama. Kohesi sosial memberikan kontribusi terhadap model keseimbangan dalam proses pencapaian stabilitas sosial. Kohesi sosial dibentuk oleh orang-orang yang memiliki rasa memiliki dan kesadaran terhadap isu-isu tertentu agar dapat bekerja sama dalam situasi tertentu (Indrawadi et al., 2022). Menurut Liliweri (2014), kohesi sosial antara sesama dan seniman pada hakikatnya merupakan hasil dari

berbagai perspektif mulai dari yang rendah hingga yang tinggi yang memengaruhi terjadinya keserasian, yaitu dalam bidang kerja sama, akomodasi, asimilasi, dan budaya.

Pemerintah Indonesia telah memberikan tugas dan dukungan kepada setiap daerah untuk memulai pembuatan kebijakan secara mandiri. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap daerah memiliki hubungan kerja yang kuat di bidang infrastruktur, pembangunan daerah, dan hal-hal lainnya. Salah satu contohnya adalah hubungan kerja antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Catatan sejarah menunjukkan bahwa Aceh dan Sumatera Utara memiliki warisan yang sama, meskipun kedua provinsi tersebut berbeda dalam hal struktur administrasinya. Provinsi Aceh dan Sumatera Utara bersatu dalam satu wilayah yang sama, yaitu wilayah Melayu yang memiliki perbedaan budaya dan adat istiadat (Pemerintah Aceh, 2022).

Provinsi Aceh dan Sumatera Utara memiliki perbedaan dalam kebijakan administratif. Aceh termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang diberi status sebagai daerah istimewa dan juga diberi kewenangan otonomi khusus. Hak rakyat Aceh untuk menentukan wilayah sendiri tercantum dalam UU No. 18 Tahun 2001 tentang hak eksklusif bagi provinsi Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sedangkan Sumatera Utara merupakan sebuah provinsi di bagian utara Pulau Sumatra (Wikipedia, 2023).

Berdasarkan penelitian tentang pola komunikasi masyarakat di desa yang multikultural dalam membentuk hubungan yang harmonis dan bagaimana upaya masyarakat dalam memperkuat kohesi sosial, dapat disimpulkan bahwa proses komunikasi antar masyarakat terjalin dengan baik dikarenakan masyarakat sangat menjunjung sikap toleransi dan penguatan kohesi sosial muncul dari penguatan tradisi masing-masing suku yang pada dasarnya mempunyai prinsip persatuan dan persaudaraan ((Mahmudin, 2021), (Indrawadi, 2022), dan (Hazrain, 2023).

Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Langkat merupakan kabupaten yang menjadi perbatasan antar Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Hal ini mengakibatkan adanya heterogenitas di antara masyarakatnya. Heterogenitas yang terjadi dapat menimbulkan dampak positif dan negatif di kedua daerah tersebut. Salah satu contoh dampak positif dari heterogenitas tersebut adalah meningkatnya toleransi dalam masyarakat, dapat dilihat dari kondisi masyarakat Tamiang dan Langkat yang hidup rukun berdampingan meskipun berbeda adat, budaya, agama dan wilayah. Selain itu heterogenitas juga memberikan dampak negatif salah satunya munculnya perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial dalam masyarakat (Amalia, 2023).

Perbedaan yang ada diantara kedua provinsi ini dapat saja menimbulkan perpecahan dan kesenjangan sosial diantara masyarakatnya. Sehingga diperlukan kesadaran masyarakat

setempat untuk memahami peraturan dan batas-batas wilayah sehingga dapat mencegah konflik. Masyarakat harus memahami bagaimana konsep nasionalisme. Jangan sampai masyarakat terjebak pada nasionalisme yang sempit dimana mereka hanya memaknai nasionalisme dalam kesamaan budaya, kebiasaan dan bahasa. Karena konsep nasionalisme Indonesia terletak pada perasaan kebangsaan yang berpijak pada kondisi masyarakat yang multikultural dan multi-etnis. Sehingga dengan konsep kebangsaan itulah negara menjamin hak-hak politik dalam entitas (suku, bangsa) untuk tumbuh dan berkembang serta menyatu dalam keindonesiaan (Irwan, 2020).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Mahmudin, 2021) fokus penelitian hanya dilakukan pada keberagaman agama yang membentuk kohesi sosial masyarakat, sedangkan (Indrawadi, 2022) fokus penelitian hanya pada konsep kohesi sosial dalam peran aktif masyarakat, dan (Hazrain, 2023), fokus penelitian hanya dilakukan pada perbedaan suku masyarakat dalam melakukan hubungan sosial. Berbeda dari ketiga penelitian tersebut, penelitian ini meneliti tentang realita kolaborasi yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat di desa perbatasan provinsi yang memiliki perbedaan agama, etnis, sosial dan budaya sehingga hal ini menjadi keterbaruan dalam penelitian ini. Selain itu, dengan fokus pada daerah perbatasan provinsi, penelitian ini memberikan kontribusi yang spesifik dan relevan untuk konteks Indonesia dimana isu perbatasan seringkali diabaikan atau kurang mendapat perhatian dalam studi sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menjelaskan realitas kolaborasi dalam membangun harmonisasi dalam memperkuat kohesi sosial di desa perbatasan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Penelitian ini penting dilakukan karena wilayah perbatasan menjadi tempat bertemunya berbagai kelompok etnis, budaya, dan agama yang berbeda. Sehingga perbedaan ini bisa saja menjadi pemicu konflik jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh pemerintah untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam membangun kohesi sosial dan mencegah konflik di wilayah tersebut. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan di wilayah perbatasan tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi saja melainkan pada aspek sosial dan budaya juga.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan deskriptif untuk menggambarkan situasi yang ada. Menurut Hendryadi (2019), pendekatan penelitian kualitatif adalah metode pengumpulan informasi tentang fenomena sosial dengan cara yang jelas dan mudah dipahami.

Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2005), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif, yang terdiri dari informasi yang ditranskripsi atau ringkasan dari objek dan subjek yang dapat diperiksa. Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan kualitatif adalah suatu metode yang digunakan dalam penelitian yang berfokus pada pengamatan mendalam yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

Penggunaan pendekatan kualitatif dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan keadaan atau fenomena dilapangan berdasarkan data yang telah terkumpul yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, dipisah berdasarkan kategori untuk mendapat kesimpulan, selanjutnya dikembangkan menjadi rumusan masalah disertai solusinya yang kemudian diajukan untuk memperoleh kebenaran dalam bentuk dukungan empiris dilapangan. Peneliti melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan terakhir menganalisis hasil penelitian. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data yang difokuskan terutama pada kolaborasi masyarakat Aceh dan Utaran dalam meningkatkan kohesi sosial.

Menurut Nurgiyantoro (2012), observasi merupakan suatu teknik pengumpulan informasi dengan cara mengamati suatu objek secara cermat dan metodis. Menurut Widoyoko (2014), observasi merupakan pembahasan yang terstruktur mengenai unsur-unsur yang muncul dalam suatu permasalahan tertentu pada objek penelitian. Berdasarkan penjelasan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa observasi merupakan suatu jenis analisis yang melibatkan penarikan simpulan dan pengamatan dari berbagai proses, baik yang lambat maupun yang cepat yang ditemui selama proses penelitian.

Menurut Lincoln, dkk (2009) wawancara adalah proses mengajukan pertanyaan secara langsung antara dua orang atau lebih untuk memperoleh informasi secara perlahan. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik "wawancara mendalam", yaitu pengumpulan informasi dari informan dengan menggunakan instrumen wawancara yang telah dikaji dan disetujui secara menyeluruh untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan dapat diandalkan. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan dan langsung.

Dokumentasi menurut Sugiyono (2013), adalah proses pemindahan data dalam bentuk dokumen. Dokumen yang dimaksud di atas dapat berupa teks, gambar, ilustrasi, atau cerita-cerita monumental. Dokumentasi merupakan hasil dari pengamatan dan pembahasan karena dilakukan dalam penelitian yang memiliki keterkaitan dengan informasi yang dikumpulkan selama sesi penelitian yang berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori sosial Emile Durkheim menyatakan bahwa "kohesi sosial terjadi karena adanya persamaan nilai-nilai, tantangan, dan kesempatan yang selalu disebabkan oleh kepercayaan". Teori kohesi sosial Durkheim merupakan konsep dasar dalam sosiologi. Ia menjelaskan bahwa fakta-fakta sosial seperti konvensi, hukum, dan lembaga sangat penting dalam menjaga kohesi sosial. Singkatnya, teori kesadaran sosial Durkheim menekankan pentingnya fakta-fakta sosial dalam mengatasi ketegangan sosial dan meningkatkan otonomi individu (Nancy, 2023). Kohesi sosial dibentuk oleh orang-orang yang memiliki perasaan dan kesadaran akan suatu kesempatan dan kepercayaan sehingga mereka dapat bekerja sama dalam suatu situasi (Indrawadi, 2022).

Temuan penelitian tentang realitas kolaborasi dalam membangun harmonisasi membuktikan bahwa tidak ada program kerjasama secara terstruktur untuk kerja sama antara Perbatasan Aceh dan Sumatera. Namun, interaksi sosial dan kerja sama antar warga masih dilakukan di dalam masyarakat. Kolaborasi antar desa lebih sering terjadi antar desa se-provinsi. Manfaat kerja sama juga tampaknya tidak merata di antara kedua desa di daerah ini karena tidak ada program khusus untuk kerja sama. Beberapa perubahan yang dirasakan seperti mempermudah masyarakat dalam menjual hasil kebun dan memenuhi barang-barang kebutuhan pokok. Selain itu, perubahan budaya juga tidak terlalu terlihat dikarenakan suku yang mendiami kedua desa ini adalah suku Jawa dan mayoritas penduduk beragama Islam.

Penelitian ini membuktikan bahwa meskipun tidak ada kolaborasi formal antara kedua desa, masyarakat tetap menghargai hubungan satu sama lain. Masyarakat juga saling berinteraksi dan berkomunikasi saat berjumpa, sebagaimana yang ditambahkan dalam teori (Rahmayani et al., 2023) bahwa solidaritas terjadi antara individu dan kelompok yang memiliki keterikatan bersama dalam kehidupan yang didukung nilai-nilai moral dan kepercayaan yang hidup dalam masyarakat. Seiring meningkatnya tingkat solidaritas di antara masyarakat, akan ada efek yang lebih nyata dari ikatan sosial bersama mereka, yang akan mengurangi penderitaan emosional mereka dan memperkuat ikatan mereka satu sama lain. Seperti yang dinyatakan dalam teori Arthur (2010), yang menyatakan bahwa kohesi sosial adalah kemampuan anggota suatu kelompok untuk terlibat dalam partisipasi aktif dan untuk tetap berada dalam kelompok tersebut.

Penelitian tentang pola komunikasi untuk membangun hubungan antaretnis yang harmonis menyatakan bahwa proses komunikasi antar kelompok di lingkungan Komplek Cedar Asri berjalan dengan baik. Tidak ada permasalahan di antara mereka karena toleransi yang tinggi, yang bersumber dari kenyataan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang bergantung pada orang lain untuk bertahan hidup dan tidak dapat hidup sendiri (Hazrain, 2023). Hal ini

juga sesuai dengan kondisi yang terjadi antar desa perbatasan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, dimana antar masyarakat sangat menjunjung tinggi solidaritas. Sejauh ini belum pernah ada permasalahan yang melibatkan pemerintah desa. Permasalahan hanya terjadi antar individu dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Komunikasi antar masyarakat juga terjalin baik.

Selanjutnya persamaan tantangan yang dirasakan di kedua desa ini seperti adanya permasalahan dalam pengadaan air bersih di Desa Halaban. Dimana masyarakat Halaban pernah bekerjasama dengan Pemerintah Aceh Tamiang dalam pengadaan air bersih, namun kerjasama ini hanya selama 8 bulan saja. Kerjasama diberhentikan secara sepihak saja yang mengakibatkan masyarakat di Desa Halaban harus membeli air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, masyarakat juga menyampaikan bahwa kurang meratanya bantuan sosial sehingga daerah yang berada di perbatasan provinsi kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Indrawadi (2022) menyatakan bahwa masyarakat mempunyai nilai dan rasa memiliki terhadap suatu harapan kesempatan dan keyakinan agar mampu bekerjasama dalam bermasyarakat sehingga terbentuklah kohesi sosial. Kohesi sosial berkontribusi pada model keseimbangan dalam proses mencapai tingkat stabilitas sosial tertentu.

Kerjasama yang terjalin baik antar individu maupun antar kelompok di desa perbatasan mencerminkan suatu hubungan timbal balik dalam proses sosial. Dimana masyarakat antar kedua desa ini saling membutuhkan dalam kegiatan sehari-hari. Seperti hubungan pekerjaan, kegiatan perekonomian dan kegiatan sosial lainnya. Hal ini sejalan dengan teori Peter (2010) yang menyatakan bahwa kohesi sosial tidak serta merta harus terjadi karena adanya interaksi yang terus-menerus, formal, dan interpersonal dengan orang lain, yang juga merupakan hasil dari interaksi sosial yang bersifat informal dan semiformal. Akibatnya, konflik interpersonal dapat muncul karena adanya hubungan timbal balik dalam interaksi sosial. Interaksi sosial individu juga sangat penting dalam hal menumbuhkan rasa percaya sosial, kerja sama tim, dan keharmonisan sosial dalam suatu sistem sosial tertentu. Hal ini ditegaskan oleh Rahayu (2016) yang menyatakan bahwa “sistem sosial tersusun dari interaksi antar individu yang berhubungan satu sama lain dalam situasi yang memiliki karakteristik fisik atau lingkungan, aktor yang dimotivasi oleh keinginan untuk “mengoptimalkan kepuasan” dan yang terhubung satu sama lain, didefinisikan dan dimediasi dalam hal sistem simbol budaya yang terstruktur dan bersama”. Dalam hal ini, tujuan akhir yang ingin dicapai adalah membentuk dan menciptakan masyarakat yang harmonis dan memiliki empati sosial yang tinggi.

Masyarakat yang harmonis akan tumbuh apabila mayoritas masyarakat tersebut memiliki pengetahuan tentang bahaya yang ada di wilayah tempat tinggalnya. Selain itu, masyarakat juga mendukung struktur kemasyarakatan yang sudah terbentuk, seperti norma sosial, adat istiadat,

dan kepercayaan yang ada dalam masyarakat tersebut guna memperkuat kekompakan masyarakat. Selanjutnya, yang penting adalah bagaimana masyarakat, partisipasi masyarakat, dan tingkat aktivitas mereka berhubungan dengan kebijakan tersebut. Hal ini juga sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Faturochman (2006) yang menyatakan bahwa kelompok yang kohesif muncul apabila semua anggota kelompok menunjukkan tingkat komitmen yang tinggi terhadap kelompoknya.

Kehidupan sosial masyarakat di desa perbatasan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara terjalin sangat baik. Sejauh ini belum ada permasalahan yang melibatkan pemerintah desa setempat. Permasalahan hanya antar pemuda dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Pada umumnya, permasalahan kohesi sosial terjadi dalam kehidupan masyarakat dikarenakan kurangnya interaksi di lingkungan masyarakat yang memunculkan sifat individualisme sehingga menyebabkan kesenjangan sosial dalam masyarakat. Namun hal ini tidak terjadi di desa perbatasan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, dikarenakan masyarakat disana sangat mendukung rasa solidaritas dan mengimplementasikan nilai-nilai gotong royong. Hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan di desa yang mengundang masyarakat antar desa sehingga terjadinya kegiatan kunjung mengunjung.

Selain itu, hubungan kekeluargaan antar desa ini juga sangat kuat dibuktikan dengan adanya masyarakat Desa Karang Jadi yang menikah dengan masyarakat Desa Halaban begitu pula sebaliknya, sehingga terjalin hubungan kekerabatan. Tidak hanya itu, masyarakat juga berinteraksi dan berkomunikasi saat duduk di warung kopi. Masyarakat tidak hanya membahas masalah pekerjaan melainkan juga tentang kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan teori Setiadi (2011) yang menyatakan bahwa interaksi sosial adalah terjadinya hubungan sosial yang dinamis baik antar individu, antar kelompok, maupun antar individu dengan kelompok ataupun sebaliknya. Interaksi sosial sangat diperlukan dalam kehidupan sosial, dikarenakan interaksi sosial terjadi dalam berbagai bentuk pergaulan antara seseorang dengan orang lain. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok, dan antara individu dengan kelompok manusia. Interaksi sosial disebut juga sebagai hubungan antara individu dengan individu lainnya, individu yang satu dapat mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya, sehingga terjadi hubungan timbal balik. Interaksi sosial juga merupakan bentuk implementasi manusia sebagai makhluk sosial. Proses interaksi sosial diartikan sebagai hubungan sosial yang dinamis (Sanusi, 2021).

Menurut Haslinda (2019), kearifan masyarakat multietnik setempat memiliki fungsi yang sama, yaitu mendukung persatuan yang berlandaskan pada harkat dan martabat manusia. Kearifan tersebut mereka laksanakan dalam bentuk kegiatan warga yang diawasi oleh aparat

desa. Penelitian tersebut sesuai dengan kondisi di desa perbatasan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, dimana masyarakat saling mendukung dalam kegiatan sosial dan menjaga persatuan dengan membuat kegiatan-kegiatan sosial yang mencerminkan sikap persatuan. Meskipun tidak pernah diadakan musyawarah antar desa untuk menghubungkan kedua desa ini, tapi pemerintah di setiap desa tetap membuat musyawarah untuk mengedukasikan kepada masyarakat bahwasanya antar desa di perbatasan harus memiliki hubungan yang harmonis.

Terkait pembahasan di atas, maka peneliti setuju dengan teori kohesi sosial yang dikemukakan oleh Emile Durkheim dikarenakan teori tersebut menjelaskan bagaimana solidaritas dan hubungan sosial antarindividu dalam masyarakat dapat menciptakan keteraturan dan stabilitas sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya nilai-nilai bersama, norma, dan kesadaran kolektif dalam memperkuat ikatan sosial dalam kelompok. Sehingga mendukung konsep teori Emile Durkheim tentang bagaimana kohesi sosial terbentuk dan dipertahankan dalam masyarakat.

Selain itu, hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa tidak harus ada program kerjasama terstruktur dari pemerintah untuk menghubungkan kerjasama antar desa perbatasan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Pada kenyataannya, masyarakat di desa perbatasan sudah menjalin hubungan sosial dan kerjasama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari baik itu antar individu maupun antar kelompok. Kemudian untuk memperkuat kohesi sosial masyarakat perbatasan dapat dilakukan dengan cara saling menghormati, menghargai dan melakukan komunikasi yang terbuka agar tidak terjadi selisih paham. Dengan memperkuat kohesi sosial antar masyarakat maka akan menciptakan masyarakat yang harmonis dan memiliki rasa empati.

Namun untuk memperkuat hubungan solidaritas antar desa perbatasan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, diperlukan kebijakan dari pemerintah desa. Pemerintah desa dapat berperan sebagai fasilitator dalam mengadakan kegiatan bersama yang melibatkan kedua desa ini, serta merancang program-program yang mendukung interaksi sosial, ekonomi, dan budaya antara desa-desa tersebut. Keterlibatan pemerintah sangat penting untuk menciptakan peluang kerjasama yang berkelanjutan, sehingga solidaritas dan hubungan sosial antar desa semakin kuat dan mendukung stabilitas kawasan perbatasan.

SIMPULAN

Hasil penelitian yang dilakukan mengenai Kolaborasi Masyarakat Perbatasan Aceh dan Sumatera Utara dalam Memperkuat Kohesi Sosial dapat disimpulkan bahwa wilayah perbatasan provinsi seringkali dihadapkan pada tantangan dalam membangun kohesi sosial karena perbedaan latar belakang etnis, agama, dan bahasa. Sehingga daerah perbatasan sering menjadi daerah dengan potensi konflik akibat kurangnya integrasi antara komunitas-komunitas

yang ada. Realitas kolaborasi dalam membangun harmonisasi di desa perbatasan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara dimana kohesi sosial tercipta karena adanya persamaan nilai, interaksi sosial yang baik, solidaritas antar individu maupun kelompok dalam kehidupan dengan didukung nilai-nilai moral dan kepercayaan yang hidup dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Rizky. (2023). *Sosiologi Kelas X SMA: Dampak Positif Akibat Adanya Heterogenitas Sosial*. <https://kids.grid.id/read/473803486/sosiologi-kelas-x-sma-dampak-positif-akibat-adanya-heterogenitas-sosial?page=all>
- Hazrain, T Muhammad, Efi Brata Madya, dan Mailin. (2023). Entitas Tionghoa Dalam Kohesi Sosial Di Komplek Cemara Asri Kab. Deli Serdang (Pendekatan Komunikasi Beragama). *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 14(1), 12-24.
- Indrawadi, Junaidi. (2022). Penguatan Kohesi Sosial Melalui Peran Aktif Masyarakat Seberang Palinggam. *Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(2), 333-339.
- Muslim, Asrul. (2013). Interaksi Sosial Dalam Masyarakat Multietnis. *Jurnal Diskursus Islam*, vol: 1(3), hal: 484-494.
- Nancy, Yonada. (2023). *Fakta Sosial Menurut Emile Durkheim dan Contohnya*. <https://tirto.id/contoh-fakta-sosial-menurut-emile-durkheim-gP5o>.
- Pemerintah Aceh. (2022). *Pemasangan pilar Batas Wilayah Aceh dan Sumut pada Segmen Aceh Tamiang-Langkat*. <https://humas.acehprov.go.id/pemasangan-pilar-batas-wilayah-aceh-dan-sumut-pada-segmen-aceh-tamiang-langkat/>.
- Sanusi, Maimun, Gabriella Martina Sirait (2021). Social Interaction Between Muslim Students and Non-Muslim Students At Syiah Kuala University. *Jurnal Community*, vol: 7(2). Hal: 135-144. DOI:10.35308/jcpds.v7i2.4364.